

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi merupakan prioritas pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan dengan merencanakan target-target pembangunan di masa mendatang. Pemerintah membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemenuhan program kerja dilakukan dengan membuat Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .

Anggaran pendapatan pemerintah daerah yang cukup besar ini mengharuskan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab sendiri untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Anggaran merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (Nordiawan,2007). Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran dana yang secara umum dan pengambilan keputusan,otorisasi pengeluaran dimasa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja.

Kabupaten Manggarai merupakan salah satu daerah yang tergolong kecil. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta dari dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan ini masih sangat kecil sehingga Kabupaten Manggarai membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah Kabupaten Manggarai yang semakin meningkat namun pengeluaran belanja daerah juga terus meningkat. Belanja daerah Kabupaten Manggarai tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan tiap tahunnya, baik dari PAD atau dari dana perimbangan. Hal tersebut berdampak pada peningkatan ukuran-ukuran makro ekonomi Kabupaten Manggarai sebagai salah satu daerah yang masih memiliki ketergantungan keuangan kepada pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai yang dilakukan dengan cara membandingkan rencana kinerja dengan tingkat realisasi. Tingkat pencapaian sasaran menunjukkan capaian kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai.

Pada Tahun 2015-2017 menemukan bahwa Kabupaten Manggarai masih dikatakan belum mandiri dari segi finansialnya. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Manggarai masih bergantung dari pemerintah pusat untuk membiayai segala aktivitas daerahnya. Hal tersebut menjelaskan permasalahan dan hambatan yang ketidakseimbangan realisasi anggaran

tersebut. Indikasinya adalah efektifitas pengendalian anggaran dalam dalam pencapaian targetnya kurang baik dan harus dilakukan perbaikan dalam akuntabilitas dan transparansi realisasi anggaran tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah, Terhadap Dana Yang Dialokasikan Secara Umum Pada Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai- Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Manggarai).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Anggaran Pendapatan Asli daerah Kabupaten Manggrai sudah terealisasi secara efektif dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah?
2. Apakah realisasi belanja daerah Kabupaten Manggarai pada Badan Perencanaan Keuangan Daerah sudah efektif?
3. Apakah Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai yang telah ditetapkan sudah tercapai dalam kaitanya dengan kemandirian keuangan daerah?
4. Apakah besarnya biaya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi penerimaan PAD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai sudah efisien?
5. Apakah realisasi dana yang dialokasikan secara umum telah seimbang dan mengalami surplus dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui ketercapaian Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai yang terealisasi secara efektif menciptakan kemandirian keuangan daerah

- a. Mengetahui realisasi belanja Kabupaten Manggarai pada Badan Perencanaan Keuangan Daerah.
- b. Mengetahui Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai sesuai dengan target yang telah ditetapkan sudah tercapai dalam kemandirian keuangan daerah.
- c. Mengetahui besarnya biaya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi penerimaan PAD pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai sudah efisien.
- d. Mengetahui realisasi dana yang dialokasikan secara umum yang telah seimbang dan mengalami surplus dalam menciptakan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Manggarai.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah, khususnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai didalam menentukan dan menetapkan penggunaan anggaran pendapatan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien dan efektif.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat membantu penulis mengaplikasikan teori ekonomi akuntansi khususnya dengan mata kuliah Penganggaran Perusahaan yang telah diperoleh selama perkuliahan di Universitas Katolik Widya Karya Malang, serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis.s

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lanjutan yang berhubungan dengan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah yang dialokasikan secara umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

